

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain menyimpan berjuta pesona wisata alam nya begitu indah, Indonesia juga kaya akan wisata budayanya yang terbukti dengan begitu banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah serta keanekaragaman seni dan adat budaya masyarakat lokal yang menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga dengan banyaknya potensi yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata¹.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan management yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan

¹Helln Angga Devi dan R.B. Soemanto, “*Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar*”, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, hlm. 34-35.

menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara.

Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan Nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata². Oleh karena itu sektor pariwisata merupakan pendapatan daerah yang diandalkan di daerah kabupaten kerinci, untuk itu perlu perhatian lebih dari pemerintah dalam pengelolaan sektor wisata yang ada di daerah kabupaten kerinci.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

²Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol 4, No. 1 Tahun 2016, hlm. 80.

Dinas Pariwisata dan UPTD sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya harus mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Menurut Damanik dan Weber elemen penawaran wisata yang harus ada di dalam pengembangan destinasi pariwisata sering disebut triple A yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, dan amenitas³. Seperti menikmati keindahan alam contohnya atau fenomena-fenomena alam yang unik dan indah seperti yang ada di Kayu Aro pengunjung atau masyarakat bisa menikmati indah nya pemandangan kebun teh yang hijau udara yang sejuk membuat nyaman pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut dan di wisata Danau Kerinci wisatawan bias menikmati keindahan Danau yang indah.

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktifitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kerinci dapat dipastikan bahwa aktifitas ekonomi akan meningkat dan pada gilirannya akan

³Achmad Afandi, Sunarti, dan Luchman Hakim, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik)*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 9, No. 1 Tahun 2017, hlm. 117.

memberi dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.

Model pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengelolaan potensi wisata daerah di Kabupaten Kerinci mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan masalah Wisata. Untuk mengelolah wisata terdapat berbagai stakeholders yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, Program-Program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stekholders dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas didalam upaya pengelolaan daerah tujuan wisata di Kabupaten Kerinci kedepannya⁴.

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsi nya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Daya tarik dalam obyek wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan dan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Keberadaan Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan mata rantai

⁴Wahyu Rohayati dan Desi Sumaranti, "Analisis Pengelolaan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin Tahun 2018", *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 8, No. 01, Tahun 2019, hlm. 29-30.

terpenting dalam suatu kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki objek wisata tersebut⁵.

Objek wisata Danau Kerinci merupakan aset yang penting bagi daerah Kabupaten Kerinci, namun dibalik keindahan wisata tersebut ada beberapa hal yang menjadi kendala pemerintah. Wisata juga merupakan tempat yang sering dikunjungi masyarakat banyak, baik dengan tujuan liburan maupun refreshing bersama keluarga, wisata Danau Kerinci sering digunakan sebagai event-event besar seperti dijadikan tempat festival Danau Kerinci, Tour The Singkarak, MTQ dan acara-acara besar lainnya.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kerinci No. 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pariwisata dalam Bab II Pasal 3 dan 4 menjelaskan, Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan tujuan kepariwisataan antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemasalahan yang sering terjadi di tempat wisata secara umum yaitu masalah kebersihan, sarana prasarana, dan infrastruktur. Masalah kebersihan

⁵Helln Angga Devi dan R.B. Soemanto, loc. cit.

dimana suatu keadaan sampah yang menumpuk, yang dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar objek wisata Danau Kerinci dan mengurangi minat wisatawan yang sedang liburan dan sampah yang menumpuk akan menjatuhkan citra objek wisata Danau Kerinci, khususnya di mata wisatawan luar. Kondisi ini, mengganggu kenyamanan dan pandangan wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Bahkan, terlihat lokasi objek wisata Danau Kerinci, tidak terawat. Tempat Pembuangan Sampah yang tidak memadai, sehingga tidak mampu menampung sampah.

Dari segi lain Kabupaten Kerinci masih menghadapi kendala dalam mengembangkan wisata alam di daerah karena keterbatasan fasilitas umum, yakni infrastruktur yang sifatnya seperti hotel dan supermarket maupun tempat persinggahan untuk wisatawan yang datang dari jauh. Untuk sarana prasarana bisa dilihat dari permasalahan kebersihan karena minimnya atau tidak memadai tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan sampah berserakan yang dapat merusak lingkungan sekitar objek wisata Danau Kerinci.

Selain itu, juga terlihat sampah yang berserakan. Kondisi ini, mengganggu kenyamanan dan pandangan wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Bahkan, terlihat lokasi objek wisata Danau Kerinci, tidak terawat. Tempat Pembuangan Sampah yang tidak memadai, sehingga tidak mampu menampung sampah. Pantauan harian ini di objek wisata yang menjadi ikon Kabupaten Kerinci, terlihat tumpukan dan sampah yang berserakan disekitar TPS. Kondisi sampah yang sudah menumpuk, seperti tidak pernah dibersihkan. Salah satu pengunjung destinasi wisata Danau Kerinci, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya,

sangat mengganggu pemandangan, apalagi aroma sampah yang mulai menyengat⁶.

Yuda, warga Kerinci, yang berkunjung ke objek wisata danau Kerinci mengungkapkan, "kebersihan dan kenyamanan, sangat menentukan nilai jual objek wisata." Yuda mengungkapkan, kondisi ini, juga terjadi di beberapa lokasi objek wisata di Kerinci. Seperti Wisata Air Panas, Air Terjun Telun Berasap dan objek wisata, serta objek wisata di Kayu aro. Sarana dan prasarana objek wisata di Kerinci sudah cukup lumayan, namun pengelolaannya yang masih kurang maksimal".

Kabupaten Kerinci masih menghadapi kendala untuk mengembangkan wisata alam di daerah ini karena keterbatasan fasilitas umum. Ada kendala yang dihadapi Kerinci dalam mengembangkan wisata, yakni infrastruktur yang sifatnya seperti hotel dan supermarket itu tidak ada di kabupaten. Meski demikian, bupati mengatakan terus mempromosikan wisata alam di kerinci, seperti wisata Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, wisata tanaman teh, wisata Air Panas Semurup, Danau Kerinci, dan wisata lainnya serta wisata budaya.

Upaya menarik wisatawan mancanegara dan nusantara kata bupati salah satunya dengan mengikuti pameran-pameran di luar daerah, serta menyebarkan brosur-brosur wisata Kerinci. Selain itu kabupaten juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang membidangi kepariwisataan. Sementara terkait infrastruktur utama, seperti jalan dan bandara, bupati mengatakan itu tidak menjadi masalah. Sebab infrastruktur utama sebagai akses ke tujuan wisata sudah sangat baik. Kalau bicara pariwisata tidak lepas dari infrastruktur sebagai destinasi objek wisata itu sendiri, dan infrastruktur fasilitas yang mengunungkan tujuan wisata itu sendiri.

⁶Hen, "Objek Wisata Danau Kerinci Tak Terawat". <https://www.aksipost.com/2018/07/01/objek-wisata-danau-kerinci-tak-terawat/>. Diakses pada 15 Desember 2020.

Pemerintah Provinsi Jambi katanya terus berupaya meningkatkan sektor kepariwisataan, sebab di Jambi banyak potensi wisata yang diyakini bisa mendunia⁷.

Sejumlah proyek yang sudah direncanakan untuk kegiatan tahun 2020 di Dinas pariwisata Kerinci, batal dilaksanakan. Beberapa proyek yang telah memiliki jadwal pelaksanaan 2020 ini, anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Karena wabah Corona, maka proyek dengan dana pusat dibatalkan. Beberapa pekerjaan yang direncanakan tahun 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dibatalkan.

Beberapa pekerjaan yang dibatalkan yakni pembangunan Menara Pandan, pagar pembatas, parkir, ruang ganti dan toilet di objek wisata Air Panas Semurup. Semula, tersedia anggaran sebesar Rp. 2 miliar, bersumber dari DAK. Namun untuk pekerjaan yang bersumber dari APBD Kerinci, tetap dilaksanakan. Seperti pembangunan Air Mancur di Dermaga Danau Kerinci dan juga pembangunan jembatan di objek wisata Air Panas Sungai Medang, Untuk dua kegiatan ini, dananya sekitar Rp. 450 juta⁸.

Permasalahan yang sedang dialami baru-baru ini diduga akibat kesalahan perencanaan awal pada pembangunan pagar beton di tempat wisata Danau Kerinci Provinsi Jambi terlihat sudah miring dan ancaman keselamatan pengunjung, kondisi pagar beton ketinggian lebih kurang 3 meter dan panjang lebih kurang 600 meter

⁷Dodi Saputra, *“Kerinci Hadapi Kendala Mengembangkan Wisata Alam”*. https://jambi.antaranews.com/berita/306477/kerinci-hadapi-kendala-mengembangkan-wisata-alam/Diakses_pada Selasa, 15 Desember 2020, 21:23 WIB.

⁸Sap/Enn, *“Sejumlah Proyek dibatalkan”* <https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/04/07/49614/sejumlah-proyek-dibatalkan/Diakses> pada Selasa, 15 Desember 2020, 21:30 WIB.

dengan kondisi tanah yang terbilang labil, sehingga kuat dugaan hal itu penyebab miringnya pagar beton tersebut⁹. Menurut salah satu warga setempat kepada awak media ini menuturkan, dirinya menduga bangunan itu ada kesalahan di perencanaan awal. Bisa saja konsultan pelaksanaannya gegabah, sehingga tidak melihat struktur tanah di area tidak baik atau kurang kuat pondasinya, atau campuran bahannya tidak sesuai standar mutu.

Dari penjelasan permasalahan diatas peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di wisata Danau Kerinci yang masih belum diselesaikan diantaranya ada dua permasalahan yang dialami Dinas Pariwisata dan UPTD yaitu dana yang terbatas dikarenakan proyek pengembangan yang akan direncanakan akan mengeluarkan dana yang cukup banyak yaitu kapal tour dan permasalahan lain dalam pengembangan wisata yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sarana dan prasarana yang ada di wisata Danau Kerinci. Untuk masalah kebersihan sudah ada kemajuan karna petugas yang bertanggung jawab sendiri di objek wisata adalah masyarakat yang berdagang di lokasi wisata tersebut, sehingga kelestarian lingkungan dijaga sebaik mungkin.

Berikut ini adalah jumlah wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci sepuluh tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

⁹Tomi, “Bahaya Pagar Beton Taman Wisata Danau Kerinci Terlihat Miring” <https://beritaanda.net/bahaya-pagar-beton-taman-wisata-danau-kerinci-terlihat-miring/Diakses> pada Selasa, 15 Desember 2020,21:45 WIB.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisma dan Wisnu Tahun 2010 Sampai Tahun 2020

Rekap Kunjungan Wisatawan Manca Negara

Wisatawan Manca Negara	Tahun Kunjungan											Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah	1.080	157	915	1.235	1.965	1.239	7.465	7.570	7.661	7.720	138	37.045

Rekap Kunjungan Wisatawan Nusantara

Pertahun Ke Kerinci

Wisatawan Nusantara	Tahun Kunjungan											Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah	252.036	29.098	26.895	38.985	70.550	112.496	106.542	221.247	223.259	258.623	147.232	1.486.963

Sumber Data:

1. Pusat Informasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci
2. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS)
3. Data Kunjungan Setiap Objek Wisata Dalam Kabupaten Kerinci
4. HPI (Guide) Kabupaten Kerinci, Home Stay, Mess, dan Rumah Penduduk Dalam Kabupaten Kerinci

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bima, pada tahun 2017, dengan judul *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan Di Kabupaten Jepara*. Mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan, peran, dampak sosial ekonomi masyarakat, dan kendala Dinas Pariwisata dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil penelitaian pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan yang dilakukan oleh Bima dan pembahasan yang disajikan, terdapat pendidikan dan pelatihan bahasa inggris, study banding, pelatihan guide, pengelolaan homestay dan lainnya, pengembangan produk wisata dengan pembangunan saran dan prasarana yang ada, pengembangan pasar dan pemasaran dengan menambahkan media informasi berbasis website dan imagepromotion serta pengembangan kelembagaan dengan membentuk kelompok sadar wisata obyek wisata Pantai Bandengan. Dari segi dampak sosial ekonomi, dampak sosial tersebut meliputi pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat. Sedangkan dampak ekonomi yang dialami adalah meningkatnya pendapatan masyarakat daerah wisata Pantai Bandengan yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan. Kendala yang di alami ada dua antara lain, kendala internal ini berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan kendala eksternal dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dalam pengembangan daerah wisata Pantai Bandengan¹⁰.

¹⁰Bima, Skripsi: *“Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan Di Kabupaten Jepara”* (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017).

Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusmalina, pada tahun 2018, dengan judul *Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*. Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui peranan dan hambatan apa saja yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola sektor pariwisata pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Hasil penelitian dari penelitian Kusmalina adalah, peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat ada tiga yaitu, sebagai Fasilitator, sebagai Motivator, dan dinamisator. Hambatan-hambatan yang di alami adalah anggaran yang terbatas, sehingga menjadi terbatas pula peran penyediaan fasilitas oleh Dinas Pariwisata. Serta akses yang susah di jangkau. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan di objek wisata tersebut lalu turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Nias Barat, dan masih minimnya promosi serta informasi akan potensi ekonomi wisata pada pengusaha wisata juga menghambat pihak ketiga tertarik mengembangkan usahanya¹¹.

Dan yang terakhir penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Media Yurida, pada tahun 2019, dengan judul *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kecamatan Pulau Pisang

¹¹Kusmalina, Skripsi : *“Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat”*(Medan : Universitas Medan Area, 2018).

Kabupaten Pesisir Barat. Dan kesimpulan nya dalam pelaksanaan program yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata melalui sarana-pasarana seperti listrik, jalan, home stay dan pengembangan SDM jasa pariwisata sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pelatihan yang diadakan setiap bulannya oleh Dinas Pariwisata yang di hadiri oleh perwakilan masyarakat. Dengan program Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan berupa materi dan praktek bagi masyarakat binaan supaya mereka lebih tau bagaimana cara memberdayakan wisata dengan baik dan hasilnya pun juga sesuai dengan harapan masyarakat dan Dinas Pariwisata. Perkembangan ekonomi melalui upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk warung dan home stay¹².

Dari penjelasan diatas tidak banyak terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan nya adalah penulis lebih menonjolkan peran UPTD dari pada Dinas dan ada objek wisata nya yang berbeda sedangkan selebihnya hampir sama dalam pengelolaan sektor pariwisata suatu permasalahan yang terjadi wisata Danau Kerinci seperti pengembangan sektor wisata dan mengatasi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di wisata tersebut. Permasalahan yang telah terjadi dan pengelolaan sektor pariwisata yang belum termanajerial dengan baik seperti dengan menumpuk nya sampah menjelaskan kurang nya terjaga kebersihan yang ada di objek wisata Danau Keinci dan kurang nya sarana dan prasarana untuk menopang sampah-sampah yang ada maupun infrastruktur lain dalam pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik.

¹²Media Yurida, Skripsi : *“Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung”*(Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Dalam misi pengembangan potensi pariwisata keberadaan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan UPTD memiliki peranan vital untuk melakukan segala kegiatan tentang pengenalan dan promosi sektor wisata kepada publik. Namun peran pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisata pengembangan potensi pariwisata itu sendiri juga masih dilematis terhadap target yang ingin dicapai, misalnya masih adanya persoalan-persoalan seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung, akses yang sulit, minimnya fasilitas penunjang, dan pengelolaan sektor pariwisata yang belum termanajerial dengan baik, sehingga campur tangan pemerintah daerah yang lebih intens sangat dibutuhkan bagi pengelolaan sektor pariwisata ini¹³. Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci Dalam Pengelolaan Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi Kasus Objek Wisata Danau Kerinci)”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Adi Syahfutra, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Istana Sayap Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009 -2011”, Jurnal FISIP, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 2.

1. Bagaimana peran UPTD Dinas Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata mengembangkan objek wisata Danau Kerinci ?
2. Apa saja upaya dalam pengelolaan sektor wisata Danau Kerinci untuk meningkatkan pengembangan objek wisata Danau Keinci ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci dan sejauh mana pengelolaan pengembangan sektor pariwisata yang di lakukan oleh UPTD Dinas Pariwisata;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kenda dalam pengelolaan sektor pariwisata dan upaya yang di lakukan oleh UPTD Dinas Pariwisata dalam pengembangan sektor wisata Danau Kerinci;

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya;
 - b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca;

- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Peran

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dari sudut pandang Poerwadarminta, Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa¹⁴.

Menurut Horton dan Hunt, Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status¹⁵. Dalam hal ini status merupakan suatu peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap seseorang pasti mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah hak dan kewajiban : peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Soekanto Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Disamping itu juga peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan

¹⁴Kusmalina, op. cit. hlm. 4-5

¹⁵Bima, op. cit. hlm. 12-14

cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya¹⁶. Seseorang dapat dikatakan berperan jika dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Abdulsyani mendefinisikan Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses¹⁷. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tepat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut.

¹⁶Ibid., hlm. 12

¹⁷Ibid., hlm. 12-13

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Linton dalam Cahyono, seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya¹⁸. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran. Bruce J Cohen mendefinisikan peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu¹⁹.

David Berry dalam Wirutomo menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan

¹⁸Gartiria Hutami, "Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)", Hlm. 5.

¹⁹Mutiawanthi, "Tantangan "Role"/ Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat Ij-Epa Setelah Kembali Ke Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, Hlm. 107.

didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain²⁰.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Henry Mintzberg dalam Thoha untuk mengetahui Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Danau Kerinci Di Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut²¹:

1. Peranan Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Peranan Dinas Pariwisata dan UPTD Dalam Pengelolaan Objek Wisata Danau Kerinci Di Kabupaten Kerinci adalah yang merupakan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kerinci. Di dalam hubungan antar pribadi tugas pokok dan fungsi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan serta pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan.

a. Peranan Sebagai *Figurehead*

Peranan sebagai *figurehead* merupakan suatu peranan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan UPTD sebagai simbol atau

²⁰Ibid., hlm. 107.

²¹Tri Agustina, Suradji, dan Imam Yudhi Prastya “*Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Trikora 2 Dan 4 Di Kabupaten Bintan*” Naskah Publikasi, Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2016.

tokoh utama didalam melakukan segala tugas dan kewajiban rutin organisasi. Dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci, peranan sebagai *figurehead* bertujuan untuk memastikan apakah pengelolaan yang selama ini dilakukan berdampak positif terhadap objek wisata Danau Kerinci tersebut.

b. Peranan Sebagai Pemimpin (*Leader*)

Peranan ini merupakan bagaimana melakukan hubungan dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya seperti memotivasi didalam mengarahkan kerja sama untuk pengelolaan objek wisata Danau Kerinci. Hal ini bertujuan untuk mempermudah tugas Dinas Pariwisata dalam menjalankan visi dan misinya yang telah di tetapkan yang menjadikan pengelolaan sebagai salah satu pencapaian mereka dalam objek wisata Danau Kerinci ini dan peran ini lebih ditujukan ke Dinas karena memiliki wewenang yang lebih layak dari pada UPTD.

c. Peranan Sebagai Pejabat Perantara (*Liaison Manajer*)

Peranan sebagai pejabat perantara ini merupakan peranan yang berinteraksi dengan organisasi atau dinas lain agar memberikan pertolongan dan informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata. Oleh karena itu organisasi tidak berdiri sendiri, maka dinas pariwisata meletakkan peranan Liaison dengan cara banyak berhubungan dengan sejumlah individu atau kelompok-kelompok

tertentu yang berada diluar organisasinya agar mendapat banyak informasi yang dibutuhkan.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

Peranan Dinas Pariwisata dan UPTD dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci yang merupakan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh pihak swasta yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kerinci. Untuk melihat bagaimanakah peranan Dinas Pariwisata dan UPTD dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari :

a. Peranan Sebagai *Monitor*

Sebagai monitor merupakan peranan untuk menerima dan mengumpulkan informasi oleh UPTD yang bersifat pusat saraf informasi agar mampu mengembangkan suatu informasi yang berguna untuk organisasi yang dipimpinnya. Dari informasi-informasi yang didapat yang bertujuan untuk menciptakan perubahan-perubahan, mengidentifikasi persoalan-persoalan dan kesempatan-kesempatan yang ada, untuk membangun pengetahuannya tentang lingkungannya, menjadi tahu kapan suatu informasi harus diberikan untuk keperluan pembuatan keputusan oleh sebuah organisasi.

b. Peranan Sebagai *Dessiminator*

Dessiminator merupakan proses yang melibatkan Dinas Pariwisata meneruskan informasi yang didapat ke dinas-dinas lain untuk melakukan pengelolaan objek wisata Danau Kerinci tersebut. Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengelolaan objek wisata Danau Kerinci dalam menangani proses informasi harus adanya koordinasi atau kerja sama dari dinas pariwisata dan dinas-dinas terkait dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci tersebut berjalan dengan baik yang berdampak pada kunjungan wisatawan yang berkunjung di Danau Kerinci tersebut.

c. Peranan Sebagai Juru Bicara (*Spokesman*)

Sebagai juru bicara Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci melakukan penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya, dengan tujuan untuk melakukan hubungan kepada masyarakat ataupun dengan para pelaku objek wisata agar pengelolaan objek wisata tersebut bisa berjalan dengan baik.

3. Peranan Pembuat Keputusan (*Decisional Role*)

Peranan Dinas Pariwisata dan UPTD Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci adalah bagaimana peranan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci yang berguna untuk menambah penghasilan masyarakat.

a. Peranan Sebagai *Entrepreneur*

Peranan ini Dinas Pariwisata bertindak sebagai perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasinya. Walaupun istilah *entrepreneur* sering dipakai oleh ahli ekonomi, tetapi oleh Mintzberg diberikan arti yang luas dalam hubungannya dengan peranan pembuat keputusan. Peranan ini melihat secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap sehingga pemimpin bisa merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang terkendali.

b. Peranan Sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*)

Peranan Dinas Pariwisata sebagai penghalau gangguan harus mengatasi masalah-masalah yang timbul agar bebas dari gangguan yang ada, seperti kerusakan kelestarian alam di sekitar objek wisata Danau Kerinci. Apabila terjadi gangguan maka harus ditanggapi dengan mengoreksinya agar bisa dicari penyelesaiannya dan peran ini lebih difokuskan kepada UPTD daerah wisata tertentu karena terlibat secara langsung.

c. Peranan Sebagai Pembagi Sumber (*Resource Allocator*)

Peranan sebagai pembagi sumber yang berguna untuk memutuskan kemana sumber dana tersebut akan dibagikan ke bagian-bagian organisasinya. Strategi harus ditetapkan agar dana yang dibagikan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang seperti Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah, waktu seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, perbekalan seperti perlengkapan-perengkapan, tenaga kerja seperti pegawai atau staf Dinas Pariwisata dan reputasi. Setiap sumber tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya lewat suatu proses pembuatan keputusan.

d. Peranan Sebagai *Negotiator*

Peranan Dinas Pariwisata harus aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Didalam bernegosiasi tersebut Dinas Pariwisata bekerja sama dengan berbagai pihak agar pembangunan dikawasan Danau Kerinci tersebut bisa cepat terwujud. Seperti para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kerinci untuk membangun resort-resort dan rumah-rumah makan, agar nanti bisa memudahkan para wisatawan-wisatawan untuk menikmati keindahan Danau Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci tersebut.

Berdasarkan urian di atas dapat diketahui bahwa peranan yang di maksud memiliki fungsi dalam kedudukan masyarakat sebagai organisasi pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan UPTD Kabupaten Kerinci sebagai pemerintah dalam masalah pengelolaan sektor objek pariwisata. Fungsi dan peran adalah memberi arahan kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang penting nya menjaga dan merawat sektor objek wisata dan mempromosikan objek wisata Danau Kerinci agar menarik minat masyarakat untuk berkunjung di Danau Kerinci.

Dari beberapa pengertian peranan, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang di harapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dalam hal ini akan relevan jika dihubungkan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pariwisata dan UPTD yang memiliki status atau kedudukan sebagai pemerintah dalam mengelola sektor wisata yang ada di Kabupaten Kerinci.

1.5.2. Teori Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan atau manajemen menurut Leiper merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah *planning*, *directing*, *organizing* dan *controlling*. Fungsi dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antar pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait²².

Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisaan, penggerakan, dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry dalam Malayu Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

²²Bima, op. cit. hlm. 15-16

tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya²³.

Penelitian ini di fokuskan pada peran UPTD Dinas Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan UPTD dalam rangka pengelolaan untuk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kerinci guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penulis menggunakan teori dari Terry George sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

²³Kusmalina, op. cit. hlm. 5

- d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Dalam rangka pengelolaan pariwisata ini, maka dilakukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada (Pemerintah dan Swasta), serta pihak lain yang diharapkan mampu mendukung tumbuh kembangnya pariwisata seperti masyarakat lokal. Menurut Isdarmanto unsur-unsur Pariwisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari²⁴ :

1. Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Dalam kegiatan wisata, ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian, faktor daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata. Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Di bawah ini adalah jenis daya tarik wisata yang biasanya ditampilkan di destinasi pariwisata:

²⁴Isdarmanto. "Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata" Yogyakarta : Gerbang Media Aksara dan StiPrAm, Tahun 2017, hlm. 14-20.

- a. Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*), segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam, misalnya: laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, hutan.
- b. Daya tarik wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*), meliputi:
Daya tarik wisata budaya (*cultural tourist attractions*), misalnya: tarian, wayang, upacara adat, lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir, lukis.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenities*)

Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Disamping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal wisatawan, selama berada di destinasi pariwisata dan kembali ke tempat semula.

3. Kemudahan Untuk Mencapai Destinasi Wisata (*Accesibility*)

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi *budget* perjalanan mereka tersebut. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.

Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi *individual tourist*, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan *travel agent*, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik. Aksesibilitas adalah sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan. Pengertian aksesibilitas tidak terbatas pada alat angkutan (transportasi) yang dapat membawa wisatawan dari tempat asalnya ke tempat dan kembali ketempat asalnya, tetapi juga meliputi semua aspek yang memperlancar dalam melakukan perjalanan. Dilihat dari pemakainya, alat angkutan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu :

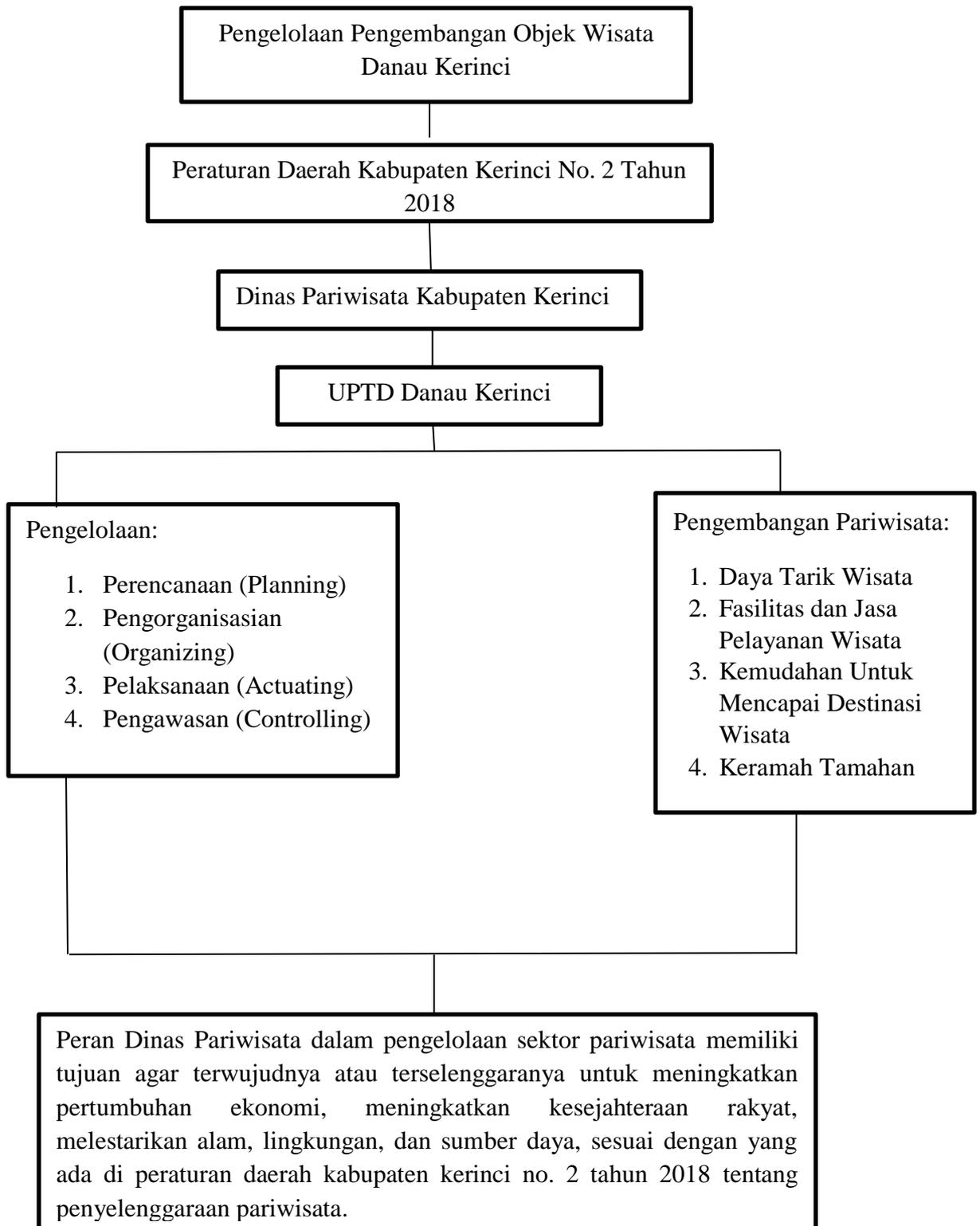
- a. Angkutan yang dapat digunakan untuk penumpang umum maupun wisatawan.
- b. Angkutan yang khusus digunakan untuk wisatawan. Menurut jenisnya angkutan dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Angkutan darat (Kereta Api, Bus, Angkot, Becak, Andong/Delman dsb)
2. Angkutan udara : Penerbangan dapat dibedakan menjadi :
 - a. *Schedul airlines* : yaitu penerbangan yang berjadwal, dengan tarif, rute dan frekuensi yang tetap.
 - b. *Charter flight* : yaitu penerbangan yang beroperasi baik secara jadwal, maupun tidak, juga dapat melakukan penerbangan berdasarkan permintaan.
 - c. *Inclusive tour atau paid up air trip* : yaitu perjalanan dimana ongkos angkutan penerbangannya sudah termasuk biaya untuk akomodasi dan biaya-biaya lain yang diperlukan selama melakukan perjalanan wisata.
3. Angkutan laut : (Kapal Ferry, Tongkang, Speed Boat, Cruiseship)

4. Keramah Tamahan (*ancilliary=Hospitality*)

Keramahtamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka ke depannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para *stakeholder* lainnya.

1.6. Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikan hasilnya²⁵. Creswell menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan imterpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian²⁶. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁷.

Pendekatan Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang

²⁵Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*", Alfabeta, cv, Tahun 2019, hlm 2

²⁶Ibid., hlm. 2

²⁷Ibid., hlm. 18

aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat²⁸.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, kantor UPTD Danau Kerinci dan di sektor objek wisata Danau Kerinci, dipilihnya sebagai lokasi penelitian karena penulis menilai lokasi tersebut dijadikan suatu objek penilaian yang bersifat ilmiah. Lokasi tersebut jika diamati lebih mendalam mengenai fungsi dan tugas nya sebagai suatu instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atau pengembangan suatu sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci.

1.7.3. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti agar penelitian dapat terarah, tidak meluas dan terkonsentrasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam permasalahan atau relevan dalam objek yang sedang diteliti. Tanpa penggunaan fokus penelitian, maka nantinya penulis akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh pada saat di lapangan. Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah tentang “Peran UPTD Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kerinci (Study Kasus Objek wisata Danau Kerinci)”.

²⁸Mudjia Rahardjo, “*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*”. Tahun 2017, Hlm. 3.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama, data yang diperoleh langsung dari responden baik melalui wawancara, observasi maupun kuesioner.

b. Data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, untuk mendapatkan landasan teori/landasan hukum mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan teknik penentuan yang di gunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Sampling Insidental*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti²⁹. Sedangkan *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data³⁰.

Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci: 1 orang
2. Kepala UPTD Danau Kerinci: 1 orang
3. Penanggung jawab pengelolaan sektor wisata Danau Kerinci: 1 orang
4. Masyarakat setempat atau pengunjung yang berpengalaman melakukan pariwisata di danau lain: 3-5 orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, observasi dan kuesioner Uraian selengkapnya sebagai berikut:

²⁹Sugiono, op. cit. hlm. 289

³⁰Sugiono, op. cit. hlm. 133

a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu³¹. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi³².

Teknik wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*). Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan³³.

b. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses

³¹Sugiono, op. cit. hlm. 304

³²Sugiono, op. cit. hlm. 195

³³Sugiono, op. cit. hlm. 306

pengamatan dan ingatan³⁴. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga ada objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi yang digunakan adalah observasi tak berstruktur karena observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung³⁵. Observasi yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu, observasi internal ada tiga bagian permasalahan yang akan di observasi : kebersihan, sarana dan prasarana, dan infrastruktur yang ada di objek wisata Danau Kerinci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah ada berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³⁶.

³⁴Sugiono, op. cit. hlm. 203

³⁵Sugiono, op. cit. hlm. 300

³⁶Sugiono, op. cit. hlm. 314

Dokumentasi yang akan peneliti gunakan adalah dokumen berbentuk tulisan (peraturan dan kebijakan) dan dokumen berbentuk gambar (foto atau video).

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Terdapat tiga jalur analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Banyak hasil penelitian diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber yang kurang credible akan memengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Terdapat empat tipe Triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lebih dalam dari penelitian penyusunan skripsi ini di butuhkan Sistematika penulisan, penelitian ini tersusun dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Deskripsi objek penelitian yang didalamnya memuat kondisi geografis, sejarah pembentukan, visi dan misi, kedudukan, fungsi dan tugas, struktur organisasi, serta sumber daya sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci maupun UPTD.

Bab III

Pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan jawaban dari permasalahan yang meliputi tentang peran yang dilakukan oleh UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam kasus pengelolaan pengembangan wisata Danau Kerinci.

Bab IV

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berisi saran perbaikan yang sesuai dengan permasalahan.